



ISSN :  
E-ISSN :  
Pp : 19-23  
DOI :

## Journal of Information System and Technology Issues

### INNOVATION MANAGEMENT IN ACCEPTANCE OF NEW STUDENTS IN STATE SENIOR HIGH SCHOOLS IN INDONESIA

Leo B. Barus

Central Tapanuli Regency Government, Pandan, North Sumatera, Indonesia. E-mail:  
barusleob@gmail.com

#### Abstract:

The classic problems of Admission of New Students to Public High Schools in Indonesia still occurs, including extortion issue, disappointment of students' parents about zoning regulations, access to educational services issue, intervention by officials, registration difficulties, and lack of seat capacity. Those problems must be addressed due to the mandate of Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the commitment of the state to the Sustainable Development Goals charter that has been mutually agreed upon with the United Nations. It was concluded that the handling was carried out through innovation management, namely through the use of certain technologies and applications that supposed to be designed innovatively according to the culture, nature and conditions of each regions in Indonesia. The technologies and applications must be accessible to the public through the website of the provincial education office or an online android application which must be designed by the provincial education offices in Indonesia.

Keywords: School, Innovation, Management, Student

#### A. LATAR BELAKANG

Permasalahan klasik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Indonesia masih terjadi. Permasalahan klasik yang selalu muncul setiap tahun, antara lain isu pungutan liar, kekecewaan para orang tua siswa akan aturan zonasi, permasalahan akses layanan pendidikan, intervensi oknum pejabat, kesulitan pendaftaran, laporan dan pengaduan jual beli, kurangnya daya tampung kursi (Detiknews, 2021), pendaftaran yang selalu mengalami kendala teknis berupa server *down* atau *website* yang sulit diakses atau terjadi gangguan jaringan, dan maladministrasi (Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, 2023).

Permasalahan ini harus ditangani segera mengingat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan tersebut harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai "satu sistem pengajaran nasional. Kemudian, Indonesia juga harus komit terhadap piagam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana pada tujuan k-4 dinyatakan untuk "*Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*" (United Nations, 2023). Sehingga studi ini berusaha untuk menjawab permasalahan bagaimana inovasi penanganan PPDB di SMA Negeri di Indonesia?

#### B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 1. Gambaran Umum Pendidikan

Manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan dan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun (Bappenas, 2023). Hal ini juga tercermin pada definisi pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Begitu halnya dengan memasuki pendidikan SMA Negeri merupakan salah satu hak mendasar bagi setiap siswa yang telah lulus SMP dan sederajat. Pendidikan tingkat SMA dan sederajat diharapkan dapat menciptakan generasi muda sebagai *agent of change* yang membawa perubahan, dan selanjutnya menjadi generasi muda yang mampu menjadi agen inovasi, yang dapat berkontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif di Indonesia (Bappenas, 2023).

## **2. Manajemen Inovasi dalam PPDB jenjang SMA Negeri**

Pada umumnya, PPDB jenjang SMA Negeri dibagi menjadi empat jalur yakni zonasi, prestasi dan afirmasi serta perpindahan orangtua (Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, 2023). Sehingga, diperlukan inovasi dalam mengatasi permasalahan PPDB jenjang SMA negeri.

Inovasi merupakan proses mencapai tujuan baru yang diinginkan, sedangkan manajemen inovasi adalah proses praktis untuk mencapai tujuan baru organisasi yang diinginkan (Qin, Li, dan Yang, 2023). Menurut Qin, Li, dan Yang (2023), inovasi dalam arti luas, mengacu pada aktivitas yang menghasilkan ide dan perilaku baru. Inovasi merupakan kunci keberhasilan yang berkelanjutan.

Inovasi tidak dapat terlepas dari manajemen inovasi. Manajemen inovasi merupakan perubahan dalam organisasi mengenai orang, struktur, dan teknologi (Qin, Li, dan Yang, 2023). Untuk menyelesaikan transformasi ide menjadi nilai pasar, manajemen inovasi memerlukan desain yang cermat dalam hal strategi, organisasi, sumber daya dan budaya (institusi), yang berarti "penghancuran kreatif" berdasarkan dekonstruksi dan manajemen "rekonstruksi dan regularisasi organisasi" (Chen *et al.*, 2019).

Kunci manajemen inovasi yang dikemukakan oleh Qin, Li, dan Yang (2023) ini dapat dipergunakan sebagai solusi menangani permasalahan PPDB pada jenjang SMA Negeri.

### **a) Orang**

Terdapat beberapa pendapat terkait orang dalam mengatasi permasalahan PPDB ini. Solusi pertama, menambah siswa dalam satu rombongan belajar alias kelas (CNN Indonesia, 2020). Solusi kedua, Dinas pendidikan provinsi memberikan Kartu Pintar ke anak yang tidak lolos PPDB untuk membantu membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah swasta (CNN Indonesia, 2020).

### **b) Struktur**

Terdapat beberapa pendapat terkait struktur dalam mengatasi permasalahan PPDB ini. Solusi pertama, penambahan kelas pada setiap sekolah negeri (CNN Indonesia, 2020). Solusi kedua, seleksi diserahkan kepada dinas pendidikan melalui cabang dinas yang ada dan tim gabungan dari sekolah, komite sekolah, dan inspektorat provinsi. Solusi ketiga, membangun beberapa SMA Negeri dan sederajat yang baru guna mengimbangi kebutuhan siswa yang masuk ke sekolah negeri (Batampos, 2021). Solusi keempat, menambah jalur disabilitas (Tempo, 2023) (selain jalur zonasi, prestasi dan afirmasi serta perpindahan orangtua).

### **c) Teknologi**

Terdapat beberapa pendapat terkait teknologi dalam mengatasi permasalahan PPDB ini. Solusi pertama, membuka sekolah virtual yang diperuntukkan bagi siswa SMA Negeri dan sederajat bagi yang tak lolos sistem PPDB jalur prestasi ataupun zonasi (Mettanews, 2022). Solusi kedua, menambah posko-posko PPDB di sekolah-sekolah atau property cabang dinas pendidikan untuk memudahkan orang tua siswa melakukan pendaftaran secara daring (Tempo, 2023).

Pengorganisasian PPDB saat ini selayaknya ditangani oleh instansi pemerintah terkait yang inovatif. Organisasi tersebut harus dapat berubah, beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan memimpin perubahan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Tanpa inovasi, organisasi pendidikan akan menghadapi risiko besar untuk menghilang dalam jangka pendek atau menengah. Memang, inovasi sulit dilakukan karena tingkat ketidakpastian yang tinggi, namun adanya manajemen inovasi yang tepat akan meningkatkan peluang keberhasilan organisasi mengingat manajemen inovasi adalah kemampuan kunci dalam lingkungan bisnis saat ini (Van den Ende, 2021). Tidak ada konsensus mengenai teori yang mewujudkan inti bidang manajemen inovasi dalam memandu praktik bisnis suatu organisasi, namun van den Ende (2021) membedakan dua tingkat dalam manajemen inovasi, yaitu tingkat organisasi/perusahaan dan tingkat proyek. Proses inovasi pada tingkat perusahaan/organisasi menggambarkan 'rantai nilai inovasi', yang berarti rangkaian aktivitas yang harus dilakukan perusahaan/organisasi agar berhasil dalam inovasi. Manajemen inovasi tingkat organisasi/perusahaan membedakan tiga jenis kegiatan utamanya, yaitu penciptaan ide (yang dapat bersifat internal, eksternal, atau lintas unit dalam perusahaan/organisasi), konversi, (yang mencakup seleksi dan pengembangan), dan difusi (yang meliputi difusi internal perusahaan dan komersialisasi di pasar) (van den Ende, 2021). Difusi adalah proses bermasalah dalam inovasi, khususnya di perusahaan/organisasi berbasis proyek dan di perusahaan multinasional (van den Ende, 2021). Berbagai jenis aktivitas membentuk rantai, dan kekuatan rantai bergantung pada bagian terlemahnya, keberhasilan inovasi di perusahaan bergantung pada aktivitas dengan kinerja terendah, adapun kemampuan dinamis adalah kapasitas perusahaan/organisasi untuk mengubah dirinya sendiri dari waktu ke waktu, untuk membuat dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kapabilitas dinamis mencakup kapabilitas untuk berinovasi produk, layanan, dan model bisnis (van den Ende, 2021). Manajemen inovasi di tingkat proyek memiliki tiga aliran penelitian, yaitu perencanaan rasional, web komunikasi, dan disiplin pemecahan masalah. Perencanaan rasional sangat mempertimbangkan pengembangan produk sebagai kegiatan terencana, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas berbagai kegiatan yang dilakukan. Web komunikasi sangat mempertimbangkan pengembangan produk sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Disiplin pemecahan masalah menekankan pentingnya pemrosesan informasi dalam pengembangan produk, misalnya oleh tim lintas fungsi (van den Ende, 2021).

Adanya beberapa studi literature terkait manajemen inovasi ini telah menghasilkan beberapa gagasan dalam menghadapi permasalahan PPDB yang selalu ada, antara lain:

a. Manajemen inovasi tingkat Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi selalu membuat peraturan tentang PPDB setiap tahunnya dengan menyesuaikan keadaan di wilayah dan setiap cabang dinasnya, lengkap dengan hot line, sistem pengaduan, dan whistle blower sistemnya. Aturan yang dibuat dan sistem yang dibangun tersebut mencakup 5 (lima) jalur, yaitu jalur disabilitas, jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, serta jalur perpindahan orangtua. Masing-masing jalur tersebut harus disesuaikan dengan banyaknya peminat sehingga perlu dilakukan seleksi pada masing-masing jalur, sehingga siswa yang diterima telah memenuhi prinsip fairness. Dinas Pendidikan Provinsi juga dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut: 1) pembukaan SMA Negeri dan sederajat yang baru dalam hal kepadatan penduduk di wilayah tertentu sudah sangat padat, 2) mengupayakan pemerataan kualitas guru, kualitas murid, dan kualitas sekolah di wilayah hukumnya, sehingga tidak terdapat SMA Negeri "elit" di masing-masing kota, 3) membuka satu kantor khusus (setara eselon 3) yang menangani teknologi, data base, sistem informasi, big data, icloud pendidikan, sehingga segala layanan pendidikan menjadi lebih mudah dan monitoring, evaluasi, dan audit sistem menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adanya kantor, misalkan Layanan Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Pendidikan di masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi akan meminimalisir segala bentuk penyelewengan PPDB di sekolah-sekolah, termasuk sekolah yang sulit dijangkau secara jarak oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Cabang Dinasnya.

- b. Manajemen inovasi di tingkat proyek
- Setiap PPDB akan dilakukan, Kepala Cabang Dinas menjadi supervisor atau ketua tim dari tim *ad hoc* penerimaan siswa di SMA negeri yang berada di wilayah hukumnya. Tim PPDB masing-masing sekolah terdiri dari Cabdis, Sekolah terkait, perwakilan Komite sekolah terkait, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pendidikan, dan lain-lain. Setiap PPDB, Kepala cabang dinas harus melakukan perencanaan rasional, web komunikasi, dan disiplin pemecahan masalah.
- 1) Perencanaan rasional mengacu pada pertimbangan pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang berkualitas sebagai kegiatan terencana, misalkan melalui web masing-masing sekolah dan web cabang dinas yang saling terintegrasi atau membuka aplikasi yang dapat didownload di HP masing-masing orang tua siswa.
  - 2) Web komunikasi  
Berguna untuk meningkatkan partisipasi public, sekaligus untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing web site atau staf PPDB. Evaluasi staf atau guru atau sekolah menjadi objektif karena web pendaftaran atau aplikasi PPDB nya terintegrasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Online.
  - 3) Disiplin pemecahan masalah  
Pemrosesan informasi oleh tim lintas fungsi di dinas pendidikan akan meningkatkan mutu pelayanan sekolah, guru, dan staf dalam PPDB, serta menghindari terjadinya pungli ataupun perbuatan melanggar hukum lainnya. Sistem informasi juga terhubung dengan stakeholder lainnya, misalkan bila terjadi perpindahan siswa dari suatu sekolah atau *bridging mobile* dengan aplikasi pendidikan yang layak.

### C. KESIMPULAN

Permasalahan terkait rekomendasi manajemen inovasi terhadap PPDB di SMA Negeri dapat ditangani melalui penggunaan teknologi dan aplikasi tertentu yang dirancang secara inovatif sesuai dengan budaya, sifat dan kondisi masing-masing daerah di Indonesia. Teknologi dan aplikasi tersebut harus dapat diakses masyarakat melalui website dinas pendidikan di daerahnya atau aplikasi android Online yang harus dirancang oleh dinas pendidikan provinsi. Peran Dinas Pendidikan Provinsi sangat vital sehubungan dengan dua tingkat dalam manajemen inovasi, yaitu tingkat organisasi/perusahaan dan tingkat proyek yang harus dievaluasi dan dimonitor oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam menangani semua permasalahan PPDB di SMA Negeri melalui manajemen inovasi.

### Daftar Pustaka

- Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten (2023), "Perlu Solusi Jitu Atasi Masalah Klasik PPDB", tersedia di laman <https://penghubung.bantenprov.go.id/Artikel/topic/1599> (accessed on May 24, 2023).
- Bappenas (2023), tersedia di laman <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/> (accessed on May 24, 2023).
- Batampos (2021), tersedia di laman <https://batampos.co.id/2021/07/29/ini-solusi-untuk-tuntaskan-persoalan-ppdb-sma-smk-di-batam/> (accessed on May 24, 2023).
- CNN Indonesia (2020), tersedia di laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630121338-20-518978/kisruh-aturan-usia-ppdb-dki-jakarta-berujung-tiga-opsi-solusi> (accessed on May 24, 2023).
- Detiknews (2021), "Masalah PPDB dari Tahun ke Tahun: Isu Pungli sampai Daya Tampung", tersedia di laman <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5580910/masalah-ppdb-dari-tahun-ke-tahun-isu-pungli-sampai-daya-tampung> (accessed on May 24, 2023).

- Mettanews (2022), tersedia di laman <https://mettanews.id/sekolah-virtual-solusi-sementara-masalah-ppdb-zonasi-di-pasar-kliwon/> (accessed on May 24, 2023).
- Qin, Zheng, Li, Yan, dan Yang, Yinzhou (2023), *Management Innovation and Big Data*, Singapura: Springer Nature Singapore Pte Ltd, p. 139.
- Tempo (2023), tersedia di laman <https://tekno.tempo.co/read/1729481/557-sekolah-di-jakarta-timur-jadi-posko-bantuan-ppdb-2023> (accessed on May 24, 2023).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- United Nations tersedia di laman <https://sdgs.un.org/goals/goal4> (accessed on May 24, 2023).
- Van den Ende, Jan (2021), *Innovation Management*, London: Red Globe Press.
- Chen, Jin, Viardot, Eric and Brem, Alexander (2019), "Innovation and innovation management", in Jin Chen, Alexander Brem, Eric Viardot and Poh Kam Wong (Eds.), *The Routledge Companion to Innovation Management*, Oxon: Routledge.